

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

a. Jurnal Penelitian Ke-1

Nama Jurnal : Journal Publicuho 2018, Vol.1 No.1. . ISSN: 2460-058X, e-ISSN: 2621-1351

Judul : *Rekomendasi kebijakan program kota layak anak di kota Kendari*

Metode Penelitian : Penelitian ini telah dilaksanakan di Kota Kendari dengan fokus penelitian pada Dinas dan Badan yang berwenang dalam Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak serta Forum Anak, pemerhati anak dan dunia usaha di Kota Kendari, Jenis dan sumber data pada penelitian ini yaitu : Data primer, berupa hasil wawancara yang diperoleh dari observasi langsung dan wawancara di lokasi penelitian dan Data Sekunder, berupa dokumen, laporan, studi literatur, hasil penelitian, informasi media massa, kegiatan gugus tugas KLA dan sumber-sumber data sekunder lainnyayangdapat dijadikan bahan kajian tujuan penelitian di lokasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik obsevasi, wawancara dan studi dokumen. Adapun observasi dilakukan untuk meninjau serta memepelajari situasi dan kondisi implementasi program Kota Layak Anak yang di lakukan Gugus Tugas KLA dan stakeholder yang berkepentingan dengan program ini untuk kemudian menjadi bahan acuan untuk melanjutkan pada tahap wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan sasaran dan inti permasalahan yangditeliti. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif milik Miles & Huberman yang meliputi :

Tahap Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini Pemerintahan Kota Kendari, lemahnya koordinasi antar satuan tugas dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Kendari yang cenderung kurang sinkron antaragen pelaksanaannya.
- b. Dinas dan Badan yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kota Kendari sebagian besar belum paham betul akan tupoksinya, serta sinkronisasi yang belum maksimal karena masih kurangnya tindak lanjut dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan.

Meskipun secara umum lingkungan ekonomi, sosial dan politik mendukung, namun di sisi lain juga menjadi penghambat mengingat Kota Kendari merupakan sebagai daerah ibukota provinsi dengan perekonomian yang cukup berkembang pesat, menjadikan Kota Kendari banyak diminati imigran yang kadang membawa dampak sosial seperti kemiskinan dan meningkatnya jumlah anak jalanan. Terkait lingkungan sosial, karakteristik masyarakat perkotaan yang masih individualis dan kurang peduli menyebabkan cenderung kurang berperan aktif. Begitupun gaya hidup masyarakat perkotaan yang cenderung bebas, sedikit banyak menimbulkan masalah tingginya kasus kekerasan anak, terutama kekerasan seksual.

b. Jurnal Penelitian ke -2

Nama Jurnal : Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018), p-ISSN 1978-5623 e-ISSN 2581-1215.

Judul : *Kota layak anak berbasis collaborative governance*

Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan

sekunder. Data sekunder diperoleh dari pemerintah daerah berupa dokumentasi yang relevan. Data primer didapat dari wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan dilakukan dengan: 1) observasi; 2) wawancara mendalam; 3) dokumen; dan 4) *Focus Group Discussion* (FGD).

Data yang dikumpulkan, dianalisis dengan analisis kualitatif, dengan model interaktif dari Miles dan Huberman.¹¹ Data primer berupa kata-kata, tuturan dan tindakan atau perilaku informan, serta data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, jurnal, karya ilmiah, data statistik dan lain-lain. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, yang memiliki 15 kabupaten/kota, dengan subjek sasaran beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Hasil Penelitian : Pemetaan terhadap berbagai isu dan permasalahan anak yang terjadi di Provinsi Lampung meliputi berbagai bidang pembangunan, mulai dari bidang kesehatan, bidang hukum, bidang sosial dan kekerasan. Untuk menyelesaikan persoalan anak, perlu dilakukan penguatan model kebijakan pembangunan Kota Layak Anak (KLA). Potensi-potensi kelembagaan yang dimiliki merupakan modal sosial untuk menyelesaikan permasalahan anak. Untuk penguatan pembangunan Kota Layak Anak, maka perlu dikembangkan model *collaborative governance*, berbasis dialog tatap muka. Model tersebut selanjutnya berkontribusi dalam menyusun perencanaan/kebijakan pembangunan Kota Layak Anak. Disarankan agar *model collaborative governance* yang dihasilkan, dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dalam bentuk penguatan ruang dialog, membentuk sebuah forum dialog yang melibatkan semua kelembagaan dan organisasi anak di Provinsi Lampung secara kolaboratif, memperkuat kebijakan, sosialisasi

pentingnya persoalan anak menjadi bagian penting dalam pembangunan.

c. Jurnal Penelitian Ke -3

Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Administrasi Publik (2019), p-ISSN 1978-5623 e-ISSN 2581-1215

Judul : *Analisis implementasi kebijakan kabupaten layak anak di kabupaten magelang*

Metode Penelitian : Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Magelang. Kemudian teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dengan subjek/informan kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepala bagian perlindungan anak, dan gugus tugas kabupaten layak anak di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Magelang, staff administrasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Secang dan ketua Forum Anak Kabupaten Magelang (Fornagel). Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan analisa data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Sugiono, 2014).

Hasil Penelitian : Melalui kerangka analisis implementasi model Van Metter dan Van Horn, ditemukan bahwa implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Magelang belum maksimal. Keenam variabel analisis dalam model Van Metter dan Van Horn berhasil membuka kelemahan-kelemahan proses implementasi kebijakan KLA, diantaranya: ketercapaian yang tidak maksimal meskipun standar dan sasaran kebijakan sudah

jas, keterbatasan sumberdaya (manusia dan finansial), komunikasi antar organisasi yang masih lemah, kurangnya pemahaman terhadap kebijakan KLA dikalangan implementor, serta pengaruh sosial masyarakat yang kuat dan bersifat negatif terhadap proses implementasi kebijakan KLA. Meskipun Kabupaten Magelang berhasil mendapatkan beberapa penghargaan terkait kebijakan KLA, namun dibalik keberhasilan tersebut masih banyak permasalahan sekaligus menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan KLA.

d. Jurnal Penelitian Ke -4

Nama Jurnal : Spirit Publik Volume 13, Nomor 2, Oktober 2018, P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875

Judul : *Implementasi kebijakan kabupaten layak anak di kabupaten pringsewu*

Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman. yang dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, yang diakhiri dengan verifikasi dan penarikan kesimpulan (Milles & Huberman, 2002).

Hasil Penelitian : Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dicanangkan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016 belum terlaksana sesuai dengan tujuannya. Dengan menggunakan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan stuktur birokrasi dapat disimpulkan keempat variabel ini belum dilaksanakan secara optimal. Meski payung hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati telah terbit, namun disposisi pada pelaksanaan tingkat menengah dan bawah belum berjalan dengan ideal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel disposisi menjadi

faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Penelitian lanjutan yang dapat dilakukan dalam tema ini yaitu mengkaji lebih lanjut umpan balik dari setiap variabel dan turunannya dalam rangka membangun Kabupaten Layak Anak di Pringsewu. Sebagai luaran, diharapkan penelitian lanjutan ini dapat memberikan estimasi waktu keberhasilan kebijakan dan menghasilkan temuan variabel/indikator utama yang menjadi kunci sukses kebijakan.

e. Jurnal Penelitian Ke -5

Nama Jurnal :Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik, Volume 2 , Nomor 1, Tahun 2020, ISSN : 2684-818X (Online), ISSN : 2338-7378 (Print)

Judul : *Analisis pelaksanaan program kota layak anak (KLA) dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan anak di kota pekan baru*

Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi (Moleong : 2007). Kemudian Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Penelitian ini menggali fakta implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru, dideskripsikan berdasarkan temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini memakai teknik purposive sampling dengan teknik penentuan informan memakai key informan.. Adapun key informan pada penelitian dibawah ini:

- 1).Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak bidang Sipil, Informasi, dan Partisipasi DPPP Kota Pekanbaru;
- 2).Kepala Seksi Bidang Pencatatan Akte Kelahiran dan Akte Kematian Disdukcapil Kota Pekanbaru;
- 3).Masyarakat kota Pekanbaru yang Bersedia menjadi Informan dan mempunyai anak.

Hasil Penelitian : a) Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru sudah semakin bagus dari pada sebelumnya, pertama dilihat dari segi penghargaan yang diberikan pemerintahan pusat pada tahun 2019 mendapatkan 3 penghargaan, sebagai KLA kriteria Nindya, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Pada tahun sebelumnya 2018 Kota Pekanbaru naik peringkat dengan meraih pratama ke Madya atau peringkat ketiga Kota Layak Anak (KLA). Terlepas dari penghargaan tersebut peneliti menemukan hasil bahwa yang menyumbang nilai tinggi itu adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam hal penguatan kelembagaan, Pemerintah Daerah sudah mempunyai peraturan turunan tentang penyelenggaraan Program Kota Layak Anak yang sekarang proses nya sedang menunggu No register di pemerintahan Propinsi. Kemudian tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut adalah pemenuhan hak anak, maka Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mendengarkan aspirasi dari anak-anak yang ada di Kota Pekanbaru melalui Fankoper (Forum Anak Kota Pekanbaru) yang menampung orng organisasi2 anak di kota pekanbaru. Dengan membawa anak- anak ikut serta dalam perumusan kebijakan bersama anggota dewan, anak-anak yang di ikut sertakan adalah anak yang sudah sekolah tingkat SLTP dan SLTA. Untuk Sumber daya manusia sudah ada Gugus Tugas (GT) sampai sekarang berfungsi, didalam GT ini sudah diatur peran dan tugas masing.

Keseriusan Pemkot juga terlihat disini dengan memberikan pelatihan rutin, yang terbaru ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau menyelenggarakan pertemuan “Bimbingan Teknis Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Dengan Analisis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Angkatan Kedua Tahun 2019 pada tanggal 03-04 September 2019 bertempat di Hotel Jatra. Anggota GT adalah seluruh perangkat daerah yang terkait dengan diketuai oleh SEKDA. Kemudian sumber dana semua dari PAD belum ada kerjasama dengan pihak swasta tapi ini menjadi PR untuk kedepannya, walaupun sudah ada APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) belum aktif karna baru terbentuk.

b) Hak Sipil dan Kebebasan Anak Indikator hak sipil dan kebebasan anak sudah beranjak bagus juga dari sebelum nya. Terlihat dari data anak yang memiliki akte kelahiran yang tahun 2017 sebanyak 75% 2018 sebanyak 81,03% pada tahun 2019 menjadi 92%. Angka ini belum cukup untuk menambah nilai Kota Layak Anak, karna target KLA adalah 100%. Untuk mempercepat peningkatan menjadi 100 % disdukcapil sudah membuat inovasi jemput bola, langsung turun ke UPTD minta data, kemudian juga bekerjasama dengan pihak sekolah. Kemudian penghapusan denda bagi yang terlambat mengurus Akte kelahiran. Sementara dari hasil penelitian juga didapat bahwa yang menyumbang data kekurangan 100% ini adalah para pendatang dan masyarakat yang kurang mampu. Kemudian dalam Hal Penerbitan KIA (Karti Identitas Anak) memang Kota Pekanbaru Terlambat dari Kota Lain, tengah tahun ini saja masih mengumpulkan data, tetapi dalam dua bulan terakhir sudah dilakukan pencetakan KIA. KIA ini juga Disdukcapil memakai sistem jemput bola dengan kerjasama dengan UPTD dan Dinas pendidikan. Dan sementara ini mereka fokus untk anak SLTP ke bawah karna pertimbangan tingkat SLTA sebentar lagi akan dapat KTP.

Dalam hal Akte Kelahiran dan KIA ini disdukcapil juga membuat inovasi lain, selain jemput bola, Disdukcapil sudah melakukan MOU dengan Rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru, sejauh ini masih tingat Rumah Sakit tetapi meningkat dari 23 sekarang sudah 27 walau masih ada yang belum aktif. Fasilitas belajar dan bermain anak, sejauh ini menjadi PR untuk meningkat kan karena fasum blum banyak yang memiliki ruang baca anak, samapai saat ini baru ada di Kantor Camat Rumbai Sudah Ada Ruang Baca Anak. Untk Fasilitas Bermain sudah banyak taman bermain anak, Taman Kota Pekanbaru, Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang, Science Park Universitas Riau, Ruang Terbuka arifin Ahmad, Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas, tetapi dari tempai ini semua belum terlalu pro anak atau belum dapat sepenuhnya memenuhi hak anak. Forum Anak sudah ada 1 per kecamatan dan juga masig- masing kelurahan mempunyai 1 forum anak, setiap taun selalu dikukuhkan oleh DPPPA, tahun ini ada tambahan yang sebelum nya 12 sekarang menjadi 12. Faktor prnghambat ada 3 yaitu dana, SDM dan regulasi, Memang sudah ada RAD di dalam APBD untuk pelaksanaan program KLA ini tetapi sejauh ini masih sangat kurang malah jauh dari kata cukup. Selain biaya juga SDM mempengaruhi karna sering nya ada pergantian pejabat sehingga sehingga perlu di sosialisasikan kembali ke pejabat yg baru tentang KLA. Kemudian regulasi yang belum terlalu mengikat semua OPD untuk bersinergitas secara total dalam mewujudkan program KLA ini

f. Jurnal Penelitian Ke -6

Nama Jurnal : International Journal of Social and Administrative Sciences, 2018, 3(2): 105-112

Judul : Policy Development Of The Child-friendly City : Case Study Of South Tangerang City Regional Government

Metode Penelitian : Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, penelitian ini memberikan

gambaran, penjelasan yang akurat secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, dan Desain penelitian menggunakan teori kebijakan publik membuat menurut Van Metter dan Horn

Hasil Penelitian : Dalam jurnal tersebut peneliti mendapati pemerintah kota tanggerang selatan telah berhasil dalam menciptakan kota layak anak dengan menciptakan kesetaraan hak anak, mengoptimalkan penyuluhan kepada implementor kebijakan kota layak anak agar lebih optimal, mengembangkan rumah penampungan di kota tanggerang selatan, dan pencapaian kesehatan dasar dan kesejahteraan, banyaknya fasilitas menyusui dan pojok menyusui, tinggi persentase imunisasi dasar lengkap untuk anak, rendahnya prevalensi gizi buruk pada balita, rendahnya angka kematian bayi (AKB), serta aktif dan ARHCIC. (Satispi, 2018)

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

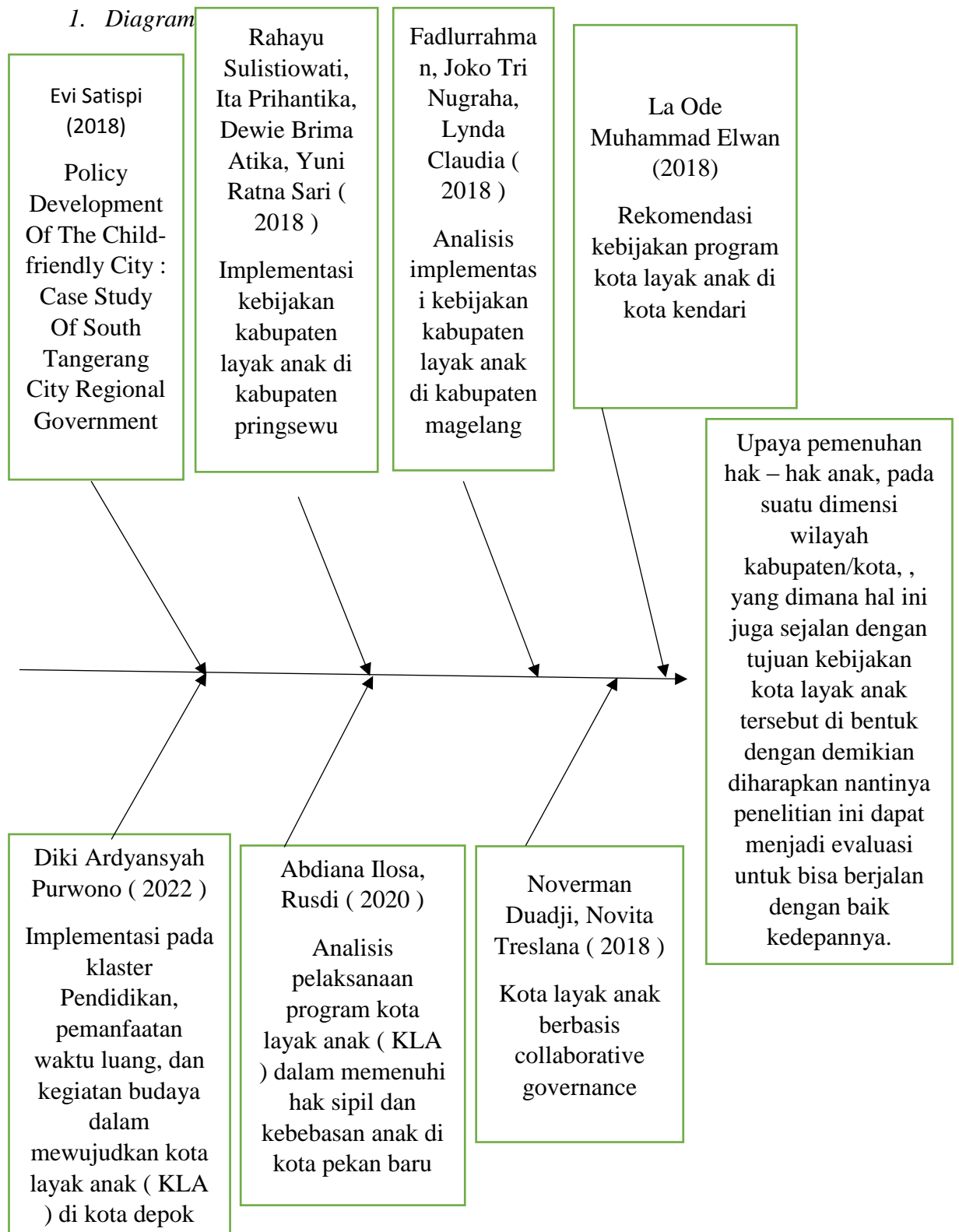
			Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	1. Peneliti :	La Ode Muhammad Elwan	Masih lemahnya koordinasi antara satuan tugas dan pelaksanaan KLA, dinas dan badan yang tergabung dalam gugus tugas KLA ini belum betul paham akan tupoksinya, dan lingkungan ekonomi,	Penelitian tersebut meneliti permasalahan kota layak anak yang ada di Kendari lalu memberikan rekomendasi – rekomendasi yang sesuai dengan masalah kota layak
	2. Judul penelitian :	Rekomendasi kebijakan program kota layak anak di kota Kendari		
	3. Tahun :	2018		
	4. Volume & ISSN :	Vol.1 No.1 . . ISSN: 2460-058X, e-ISSN: 2621-1351		

	5. Asal penelitian :	Kendari	social dan politik dapat mendukung namun juga dapat menghambatnya.	anak yang ada di Kendari tersebut.
2	1. Peneliti :	Noverman Duadji, Novita Treslana	Permasalahan anak yang terjadi di	Penelitian tersebut meneliti pada pengembangan collaborate governance dalam penguatan kebijakan pembangunan kota layak anak
	2. Judul penelitian :	Kota layak anak berbasis collaborative governance	Provinsi Lampung meliputi berbagai bidang pembangunan, mulai dari bidang	
	3. Tahun :	2018	bidang kesehatan, bidang hukum, bidang	
	4. Volume & ISSN :	p-ISSN 1978-5623 e-ISSN 2581-1215	sosial dan kekerasan.	
	5. Asal penelitian :	Lampung	Untuk penguatan pembangunan Kota Layak Anak, maka perlu dikembangkan model collaborative governance, berbasis dialog tatap muka. Model tersebut selanjutnya berkontribusi dalam menyusun perencanaan/kebijakan pembangunan Kota Layak Anak.	
3	1. Peneliti :	Fadlurrahman, Joko Tri Nugraha, Lynda Claudia	Implementasi kebijakan kabupaten layak	Penelitian tersebut meneliti pada proses pelaksanaan

	2. Judul penelitian :	Analisis implementasi kebijakan kabupaten layak anak di kabupaten magelang	anak di Kabupaten Magelang belum maksimal. Keenam variabel analisis dalam model Van Metter dan Van Horn berhasil membuka kelemahan-kelemahan proses implementasi kebijakan KLA	kebijakan kota layak anak dan juga terkait semua program dari kebijakan tersebut
	3. Tahun :	2018		
	4. Volume & ISSN :	ISSN 2549-9165 (Print), ISSN 2580-2011 (Online)		
	5. Asal penelitian :	Magelang		
4	1. Peneliti :	Rahayu Sulistiowati, Ita Prantika, Dewie Brima Atika, Yuni Ratna Sari	Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dicanangkan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016 belum terlaksana sesuai dengan tujuannya. Dengan menggunakan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat disimpulkan keempat variabel ini belum dilaksanakan secara optimal.	Penelitian tersebut meneliti pada pelaksanaan kebijakan kota layak anak dan juga semua program dari kebijakan tersebut. penelitian ini menggunakan model Edward III
	2. Judul penelitian :	Implementasi kebijakan kabupaten layak anak di kabupaten pringsewu		
	3. Tahun :	2018		
	4. Volume & ISSN :	Volume 13, Nomor 2. P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875		

	5. Asal penelitian :	Pringsewu		
5	1. Peneliti :	Abdiana Ilosa, Rusdi	Kebijakan kota layak anak di pekan baru sudah berjalan baik dan pada sektor hak sipil dan kebebasan anak, namun ada beberapa factor penghambat yaitu, dana, sdm, dan regulasinya.	Penelitian tersebut berfokus pada indicator hak sipil dan kebebasan anak dalam kebijakan kota layak anak di kota pekan baru
	2. Judul penelitian :	Analisis pelaksanaan program kota layak anak (KLA) dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan anak di kota pekan baru		
	3. Tahun :	2020		
	4. Volume & ISSN :	Volume 2, Nomor 1. ISSN : 2684-818X (Online), ISSN : 2338-7378 (Print),		
	5. Asal penelitian :	Pekan baru		
6	1. Peneliti :	Evi Satsipi	Dalam jurnal tersebut peneliti mendapati pemerintah kota tanggerang selatan telah berhasil dalam menciptakan kota layak anak dengan menciptakan kesetaraan hak anak,	Penelitian ini meneliti ke semua klaster kota layak anak sehingga mendapati hasil yang berbeda disetiap klasternya
	2. Judul penelitian :	Policy Development Of The Child-friendly City : Case Study Of South Tangerang City Regional Government		
	3. Tahun :	2018		

	4. Volume & ISSN :	2521-0556	<p>mengoptimalkan penyuluhan kepada implementor kebijakan kota layak anak agar lebih optimal, mengembangkan rumah penampungan di kota tanggerang selatan untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan, dan meningkatkan peran masyarakat di lingkup rw untuk turut serta dalam menjalankan program kota layak anak.</p>	
	5. Asal penelitian :	Tangerang Selatan		



Gambar 2. 1 Diagram Fish Bone

Pada jurnal – jurnal tersebut sama – sama memiliki satu tujuan yaitu upaya pemenuhan hak-hak anak pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota, dari masing-masing jurnal tersebut juga memiliki hasil dan perbedaan yang ada di dalam jurnal tersebut. Pada jurnal La Ode Muhammad Elwan (2018) yang berjudul Rekomendasi kebijakan program kota layak anak di kota Kendari memperoleh hasil masih lemahnya koordinasi antara satuan tugas dan pelaksanaan KLA, pada jurnal Noverman Duadji, Novita Treslana (2018) yang berjudul Kota layak anak berbasis *collaborative governance* memperoleh hasil permasalahan anak yang terjadi di Provinsi Lampung meliputi berbagai bidang pembangunan, mulai dari bidang kesehatan, bidang hukum, bidang sosial dan kekerasan, pada jurnal Fadlurrahman, Joko Tri Nugraha, Lynda Claudia (2018) yang berjudul analisis implementasi kebijakan kabupaten layak anak di kabupaten magelang memperoleh hasil implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Magelang belum maksimal, jurnal Rahayu Sulistiowati, Ita Prihantika, Dewie Brima Atika, Yuni Ratna Sari (2018) dengan judul implementasi kebijakan kabupaten layak anak di kabupaten pringsewu yang memuat hasil Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dicanangkan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016 belum terlaksana sesuai dengan tujuannya, dan jurnal Abdiana Ilosa, Rusdi (2020) dengan judul analisis pelaksanaan program kota layak anak (KLA) dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan anak di kota pekan baru memuat hasil Kebijakan kota layak anak di pekan baru sudah berjalan baik dan pada sektor hak sipil dan kebebasan anak, namun ada beberapa factor penghambat yaitu, dana, sdm, dan regulasinya, jurnal Evi Satsipi tahun 2018 dengan judul Policy Development Of The Child-friendly City : Case Study Of South Tangerang City Regional Government yang memuat hasil bahwa kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan anak perlindungan negara Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pembangunan kota layak anak. Dilihati dari hasil jurnal jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa pada setiap kabupaten dan kota memiliki beberapa permasalahan kebijakan kota layak anak yang berbeda –

beda selain itu yang membedakan pada penelitian – penelitian yang lainnya menggunakan ke lima klaster kota layak anak sedangkan pada kebaharuan penelitian ini hanya berfokus pada satu klaster yaitu klaster ke 4, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sehingga hasil yang didapatkan lebih dalam lagi dibandingkan dengan membahas semua klaster di kota layak anak.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Kebijakan Publik

2.2.1.1 Definisi Kebijakan

Thomas R. Dye dalam mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun pilihan maupun sikap pemerintah untuk melakukan sesuatu atau justru tidak melakukan.(Subarsono. 2008.) Ada beberapa teori tentang kebijakan, diantaranya menurut Ealau dan pewit (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh pelaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut ; Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip – prinsip yang mengatur Tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu, sedangkan menurut Edi Suharto (2008:7), kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip – prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain tiga teori diatas, kebijakan pun dapat didefinisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu :

1. Teori kelembagaan, memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan, dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.

2. Teori kelompok, yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok, yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai – nilai kelompok elit yang memerintah.
3. Teori elit, memandang kebijakan pemerintah sebagai nilai – nilai kelompok elit yang memerintah..
4. Teori rasiona, memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui system pengambilan keputusan yang tetap.
5. Teori incremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau, atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
6. Teori permainan, memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi – situasi yang saling bersaing.
7. Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran, yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan incremental.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (2004: 31-35) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan ;

1. kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang – undang.

3. Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. (Sore, 2017)

James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan – badan dan pejabat – pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan beorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi Tindakan – Tindakan atau pola – pola tindakan pejabat – pejabat pemerintah.
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,
4. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu,
5. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif),
(James, 1984;3-5)

Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pernyataan bahwa kebijakan terkait dengan pemerintah tidak hanya disampaikan oleh James E. Anderson. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras pemerintah

serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (George C. Edwards III 1978:2). (Karmanis, Buku Pedoman Belajar Studi Analisis Kebijakan Publik, 2020)

Menurut Tilaar dan Nugroho (2009) istilah kebijakan publik mempunyai banyak pemahaman teoritis, yang dirumuskannya demikian. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan (Tilaar dan Nugroho, 2009).

Berdasarkan definisi di atas jelaslah bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Thomas R. Dye merangkum dari definisi-definisi mengenai kebijakan publik demikian: "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*" (Dye, 1978). Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan (Dye, 1978). Pusat perhatian kebijakan publik tidak hanya pada apa yang dilakukan pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Karena hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah menurutnya juga mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Suntoro dan Hariri, 2015). (Kurhayadi, 2020)

2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan

2.2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan

(Nugroho, 2009), kejelasan makna implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan public, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat (Akib & Tarigan, 2008). Howlett (2019) menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Oleh karena implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Elmore (1979) bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Implementasi Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan untuk mencapai tujuan (Pulzi & Treib 2017). Benoit, Smith, Jansson, Healey, &

Magnuson (2019) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Clowney (2011) mengemukakan sifat kebijakan tersebut kompleks dan saling tergantung, sehingga sangat sedikit kebijakan negara yang bersifat "*self executing*" yang mana perumusan kebijakan yang telah ditetapkan dapat langsung diimplementasikan. Sedangkan yang paling banyak adalah kebijakan yang bersifat "*Non self executing*" dimana kebijakan tersebut dapat diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan. (Ati, 2020)

Pengertian implementasi menurut Jones (1991), dimana implementasi diartikan "*getting the job done*" dan "*doing it*". Implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Lain halnya dengan Implementasi kebijakan baik buruknya akan sangat dipengaruhi oleh perilaku para pelaksana kebijakan namun implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh pelaksanaan proses pembuatan kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan publik melalui empat (4) tahapan yaitu: (1) Tahap Perumusan: dimulai dari penetapan rumusan masalah sampai pemilihan alternatif masalahnya, untuk rekomendasi dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. (2) Implementasi kebijakan publik ada tiga bentuk yaitu implementasi kebijakan publik secara langsung, secara tidak langsung dan yang bersifat campuran. (3) Monitoring kebijakan publik merupakan proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik, untuk melihat seberapa jauh tujuan itu tercapai (4). Evaluasi „bertujuan untuk dapat menilai perbandingan dan perbedaan sebelum dan sesudah implementasi.

Implementasi kebijakan dapat diperoleh dari penyataan Grindle (1980:7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. (Karmanis, Analisis Implementasi Kebijakan Publik, 2020)

Menurut Van Metter dan Van Horn, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan – kebijakan public, yakni : Pertama, kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Misalnya, keberhasilan implementasi kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia akan berbeda dengan kebijakan untuk menanggulangi kenakalan remaja. Hal ini disebabkan oleh tipe kebijakan yang berbeda antara pengentasan kemiskinan dan kenakalan remaja. Kedua, faktor – faktor tertentu yang mendorong realisasi atau non realisasi tujuan – tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan yang lain. (Prof. Dr. Budi Winarno, 2008)

Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001:75), menjelaskan bahwa keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “ jembatan “ yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Model pendekatan implementasi kebijakan yang

dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

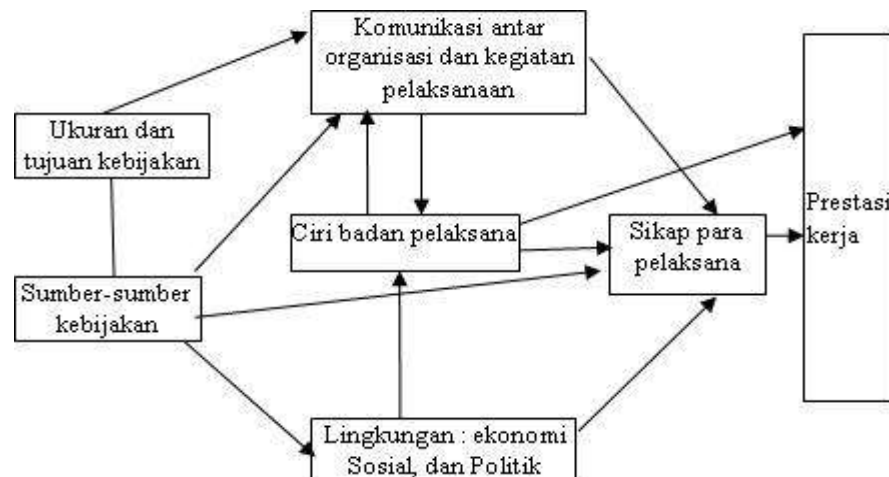
1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan;
 2. Sumber daya;
 3. Karakteristik organisasi pelaksana;
 4. Sikap para pelaksana;
 5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
- (Zulfian, 2014)

2.2.2.2 Indikator Implementasi Kebijakan

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik



Gambar 2. 2 Indikator

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:89) dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur

yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:90) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

2. Sumber daya Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Karakteristik organisasi pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan

konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater dalam Agustinus (2006:91) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara

akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:94) “ sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya

menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial* “. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Fokus implementasi kebijakan adalah pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditetapkan sebagai keputusan politik. Oleh karenanya, dalam implementasi kebijakan akan berkaitan dengan konsistensi pejabat pelaksana dengan keputusan kebijakan, pencapaian tujuan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi output dan dampak kebijakan serta melakukan formulasi kembali sesuai pengalaman lapangan. Atas dasar itu, kemudian dinamika implementasi sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkait satu dengan lainnya. (Zulfian, 2014)

1.3 Kota Layak Anak

2.3.1 Pengertian Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

UNICEF mendefinisikan kota layak anak sebagai sebuah sistem pemerintahan lokal yang baik dan berkomitmen pada implementasi konvensi internasional mengenai hak – hak anak (*Convention on the Right of the Child*) (Dr. Ir. Mahditia Paramita, 2014)

1.4 Indikator Pada Klaster Kota Layak Anak

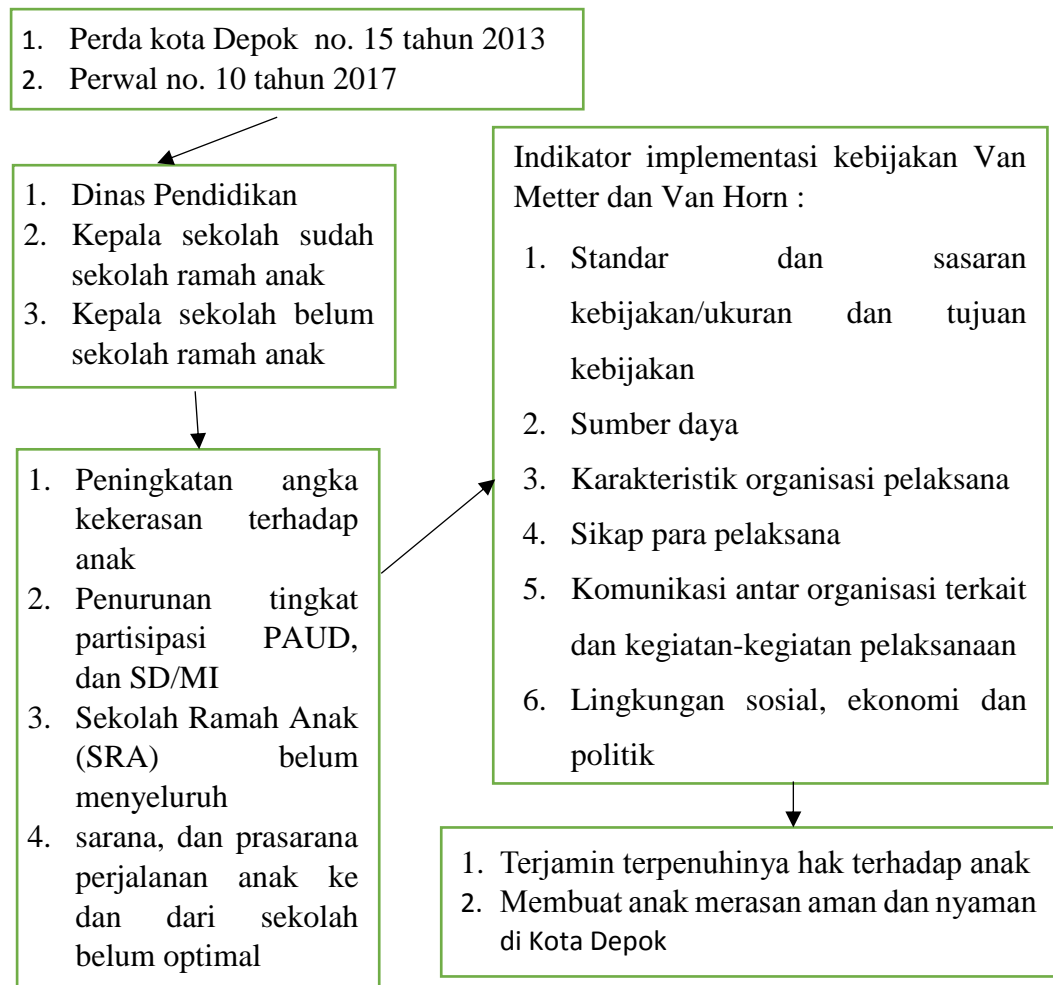
Tabel 2. 2 Indikator Kota Layak Anak

No.	Klaster	Indikator
1.	Hak sipil dan kebebasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran. b. Tersedia fasilitas informasi layak anak. c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
2.	lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak. c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
3.	Kesehatan dasar dan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> a. Angka Kematian Bayi. b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita. c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. d. Jumlah Pojok ASI. e. Persentase imunisasi dasar lengkap. f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental. g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan. h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih. i. Tersedia kawasan tanpa rokok.
4.	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini. b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun. c. Persentase sekolah ramah anak. d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana

		<p>perjalanan anak ke dan dari sekolah.</p> <p>e. Persedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.</p>
5.	Perlindungan khusus	<p>b. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan.</p> <p>c. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>).</p> <p>d. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.</p> <p>e. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/kota Layak Anak.)</p>

1.5 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 3 Kerangka Berfikir

Dengan adanya kebijakan yang di buat oleh pemerintah kota yaitu Perda kota Depok no. 15 tahun 2013 Mengenai Kota Layak Anak (KLA), Perwal no. 10 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kota Layak Anak, yang di mana peran dari stake holder yang terlibat juga akan sangat mempengaruhi proses berjalannya kebijakan kota layak anak ini baik itu dari dinas pendidikan. Dengan permasalahan yang terjadi saat ini masih banyak yang perlu di perhatikan terutama pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang permasalahannya meliputi : Peningkatan angka kekerasan terhadap anak, penurunan tingkat partisipasi PAUD, dan SD/MI, Sekolah Ramah Anak (SRA) belum

menyeluruh, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah belum optimal, dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang memiliki 6 indikator sebagai berikut Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Diharapkan dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga output yang di dapat adalah pemenuhan hak terhadap anak.

